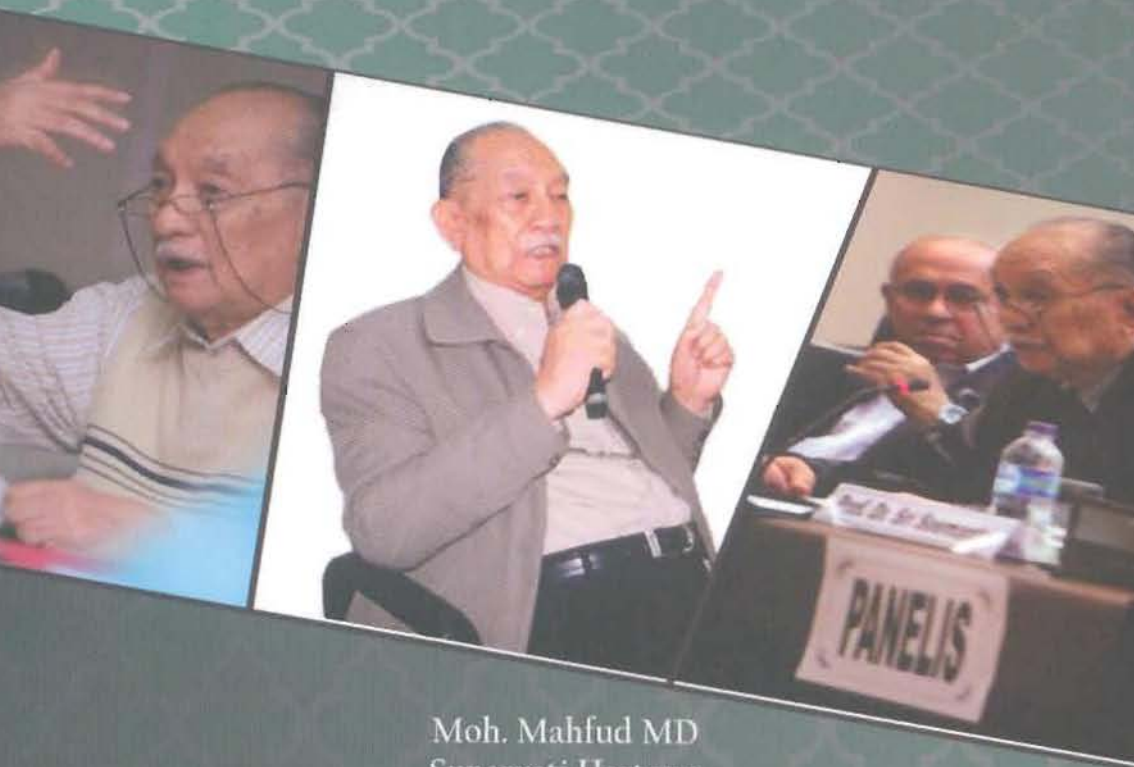


Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif



Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Kata Pengantar: Prof. Dr. Suteki, SH, MHum dan Awaludin Marwan, SH, MH, MA

Konsorsium Hukum Progresif 2013



Thafa Media



Konsorsium
Hukum Progresif

Konsorsium Hukum Progresif
2013

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih — v

Daftar Isi — xi

BAGIAN KESATU

PEMBICARA — 1

- Inilah Hukum Progresif Indonesia—MOH. MAHFUD MD — 3
- Membangun Hukum Nasional Indonesia menjadi Hukum yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan—SUNARYATI HARTONO — 12
- Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi—SIDHARTA — 23
- Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis—BERNARD L. TANYA — 39
- Membebaskan Nalar Hukum (*Wacana Intertekstualitas dan Masa Depan Hukum Progresif*)—ANTHON F. SUSANTO — 49
- Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Progresif—YUDI KRISTIANA — 59

BAGIAN KEDUA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH ILMU HUKUM — 67

- Peneguhan Posisi Hukum Progresif dalam Peta Akademik Filsafat Hukum—NATANGSA NURBAKTI — 69
- Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik?—TRISTAM MOELYONO dan RACHMAWATI PUSPITADEWI — 179
- Feminisme Hukum *Versus* Keadilan Sosial—ELITA RAHMI — 91
- Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia, Bagaimanakah Hukum Progresif Meresponnya?—ENDRA WIJAYA dan ZAITUN ABDULLAH — 104

- Teori Hukum Feminis dan Hukum Progresif—NIKEN SAVITRI — 120
- Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila—WAHYU NUGROHO — 134
- Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif—SUPARNYO — 153
- Pertarungan Filsafat Barat dengan Filsafat Religius dalam Hukum, Etik dan Gaya Hidup—TRI LISIANI PRIHATINAH — 165
- Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif—NUR ROHIM YUNUS — 176
- Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Pondasi Teoritik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia—MELLA ISMELINA, ANTHON F SUSANTO, dan M. HUSNI SYAM — 197
- Pemikiran Hukum Progresif: Otentitas Pemikiran Berbasis Ideologi Ke-Indonesiaan—KHUDZAIFAH DIMYATI — 206
- Batas-Batas Kepastian Hukum Asas Legalitas, Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis—KAMRI AHMAD — 212
- Pembabakan Hukum Progresif—SULAIMAN — 223
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 234
- Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (*Core Value*) sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif—GANDA SURYA SATYA — 243
- Perkembangan Teori Daya Mengikatnya Hukum Internasional—H. MOHD. ISPLANCIUS ISMAIL — 264
- Islam dan Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara—MOHAMMAD DARUDIN — 278

BAGIAN KETIGA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH PENEGAKAN HUKUM — 293

- Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Perspektif Hukum Progresif (Hasil Penelitian di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat)—ENDANG SUTRISNO — 295
- Penafsiran Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cyber Crime*—INDUNG WIJAYANTO — 321
- Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

- Tengah berkaitan dengan Penegakan Hukum Hak Cipta di Kota Semarang—RINDIA FANNY — 330
- Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penghormatan terhadap Hak atas Tanah—ROFI WAHANISA — 341
- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan Substantif bagi Korban Kejahatan—RENA YULIA — 352
- Melacak Spiritualitas Hukum Progresif dalam Konstruksi Hukum Lokal Berbasis Modal Sosial (Pembacaan atas Pengelolaan Ketenagalistrikan di Curug Muncar Pekalongan)—SHINTA DEWI — 363
- Penegakan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia melalui Hukum Progresif (Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengajuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD—SRI HASTUTI PUSPITASARI — 379
- Penegakan Hukum Progresif pada Kasus Ketidakamanan Pangan dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Sosial—SRI LESTARININGSIH — 394
- Budaya Hukum Progresif Hakim *Ad Hoc* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi—SININTHA Y SIBARANI — 403
- Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo—DIAN EKAWATI ISMAIL dan YUSUF TULOLI — 415
- Hukum Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat—WURIANALYA MARIA NOVENANTY — 427
- Hukum Progresif dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia—DEWI SUKMA KRISTIANTI — 442
- Rekonstruksi Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif—MAHRUS ALI — 459
- Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan Keluarga melalui Hukum Adat Laraga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara—RUDY HAPOSAN SIAHAAN — 475
- Peran Hukum Progresif dalam Penegakan Atas Hak Membentuk Serikat Buruh—ASRI WIJAYANTI — 494
- Penegakan dan Pembaharuan Hukum Progresif bagi Buruh melalui PKB—ASRI WIJAYANTI, MURIDAH ISNAWATI, UMAR SHOLAHUDDIN, M. HARI WAHYUDI, dan SUDARTO — 512
- Peran Hakim dalam Menegakkan Hak Pensiun Buruh—ASRI WJAYANTI dan SLAMET SUHARTONO — 529

- Menggeser Pemikiran Hukum Kapitalis di Bidang Digital Multimedia—**BESAR — 542**
- Pengaruh Kebiasaan Masyarakat Nelayan Muncar dalam Penerapan Sistem Kerja dan Bagi Hasil Bidang Perikanan Tangkap Berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia—**DJOKO WAHYU WINARNO, ROSITA CANDRAKIRANA dan RAHAYU SUBEKTI — 560**
- Tata Kelola Laut Tradisional Masyarakat Adat di Pulau Kei Kecil (SASI) sebagai Objek Perlindungan *Traditional Knowledge*—**THERESIA NOLDA AGNES NARWADAN — 570**
- Peranan Hukum Progresif dalam Melindungi Hak Asasi dan Pemberdayaan Kelompok Marginal—**YOHANES SUHARDIN — 580**
- Pelanggaran Perbudakan Domestik Perempuan oleh Negara (Kritik Feminis terhadap UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)—**DIAN PUSPITASARI — 593**

BAGIAN KEEMPAT

HUKUM PROGRESIF DI DALAM RANAH KEBIJAKAN HUKUM — 605

- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif—**ANI PURWANTI — 607**
- Hukum Progresif sebagai “Obat Penawar” dalam Pertentangan Ideologi Kapitalis dan Sosialis pada Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tembakau—**LUH RINA APRIANI, RIFKIYATI BACHRI, dan RICCA ANGGRAENI — 623**
- Pembinaan Anak Nakal Pelaku Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*) di Pondok Pesantren: Alternatif Penjatuhan Sanksi dalam Upaya Resosialisasi—**HERRY SUBONDO dan MUHAMMAD AZIL MASKUR — 635**
- Spirit Hukum Progresif Guna Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Penolak Regulasi Formal (Studi Kasus Kebijakan Relokasi *Versus* Hak EKOSOB Warga di KRB III Gunung Merapi Pasca-erupsi 2010—**AL WISNUBROTO — 646**
- Pencapaian Keadilan Substantif Melalui *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Ringan—**CAHYA WULANDARI**
- Ekonomi Pancasila sebagai Upaya Membangun Perekonomian Bangsa Indonesia Ditinjau dari Pandangan Progresif—**DIAN NARWASTUTY, CHRISTIN SEPTINA BASANI, dan P LINDAWATY — 672**

- Musyawarah Mufakat sebagai Petunjuk Arah Sistem Politik Indonesia—**NICKY FACHRIZAL — 681**
- Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bekerja (Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Progresif)—**MUTIA CHERAWATY THALIB — 692**
- Pengaruh Gerakan Feminisme terhadap Kebijakan Publik di Indonesia—**RISTINA YUDHANTI — 702**
- Refleksi Teori Hukum Progresif dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak: Tinjauan Normatif PERDA DKI—**WAHYUNING dan RURY OCTAVIANI — 714**
- Bantuan Hukum Gratis bagi Orang Miskin (Diskursus Keberpihakan Progresif dan Penegakan Hukum Diskriminatif)—**MUHAMMAD RUSTAMAJI — 724**
- Mengembangkan Konsep Ideal Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak—**AYUB TORRY SATRIYO KUSUMO, ANDINA ELOK PURI MAHARANI, dan ROSITA CANDRAKIRANA — 736**
- Perspektif Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terhadap Status dan Kedudukan Perusahaan Kelompok dalam Sistem Hukum Perusahaan Indonesia—**RATNA JANUARITA — 749**
- Kebijakan Perlindungan Saksi Berperspektif Hukum Progresif—**MUCHAMMAD IKSAN — 769**
- Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi—**EKA JUARSA — 783**
- Menuju Badan Pemeriksa Keuangan yang Progresif dalam Mendukung Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia—**HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG — 799**
- Hukum Progresif sebagai *Restitutio in Integrum* dalam Mewujudkan *Religious Nation State* di Indonesia—**ARIF HIDAYAT — 816**
- *Quasi Contrac* sebagai Model Pendekatan Hukum Progresif—**PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO — 825**
- Kebijakan Formulasi Daluwarsa Penuntutan Pidana di Indonesia—**BAGUS HENDRADI KUSUMA — 842**
- Instrumentalisme Hukum dalam Ruang Politik sebagai Progresivitas Hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada Transisi Demokrasi di Indonesia—**ISHARYANTO — 862**
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—**AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 873**